

SATU ATAP EMPAT WAJAH: MULTIKULTURALISME ETNIK GORONTALO, BUGIS, JAWA, DAN CINA DI KOTA GORONTALO

Hendri Gunawan

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara
Jln. Katamso, Bumi Beringin Lingkungan V
hendrygunawan2010@yahoo.com

Muhammad Anggie Farizqi Prasadana

Universitas Ivet
Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 17 Semarang
farizqi.anggie@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang multikulturalisme etnik Gorontalo, Bugis, Jawa, dan Cina di Kota Gorontalo. Selain itu, Kota Gorontalo juga dihuni berbagai penganut agama, mulai dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Keragaman suku bangsa dan agama di Kota Gorontalo telah berlangsung lama sejak masih berbentuk kerajaan dan berlangsung hingga kini. Mereka semua dapat hidup berdampingan dengan baik. Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedatangan etnik pendatang Bugis, Jawa, dan Cina di Kota Gorontalo didorong karena statusnya sebagai pusat perdagangan. Kaum pendatang itu kemudian menetap dan membangun permukiman. Potensi konflik yang ada dapat diredam karena adanya perkawinan campuran antara etnik pendatang dan etnik lokal, sikap saling toleransi, serta peran serta berbagai elemen masyarakat.

Kata kunci: *multikulturalisme, multi-etnik, toleransi, Kota Gorontalo.*

ONE ROOF FOUR FACES: GORONTALO, BUGIS, JAVANESE AND CHINESE ETHNIC MULTICULTURALISM IN GORONTALO CITY

Abstract

This paper discusses the multiculturalism of Gorontalo, Bugis, Javanese, and Chinese ethnicities in Gorontalo City. In addition, Gorontalo City is also inhabited by various religious believers, ranging from Islam, Catholicism, Christianity, Hinduism, Buddhism, to Confucianism. The diversity of ethnic groups and religions in Gorontalo City has been going on for a long time since it was still in the form of a kingdom and has continued until present. They all can coexist well. This analytical descriptive research was conducted in Gorontalo City, Gorontalo Province. The method of literature study and in-depth interviews was performed to analyze the data. The results showed that the arrival of Bugis, Javanese and Chinese migrants in Gorontalo City was encouraged by the city status as a trade center. The migrants then settled and built houses. The potential for conflict can be mitigated because of mixed marriages between migrant and local ethnicities, mutual tolerance, and the participation of various elements of society.

Keywords: *multiculturalism, multiethnicity, tolerance, Gorontalo City.*

Naskah masuk: 20 - 06 - 2021 ; Revisi akhir: 22 - 11 - 2021 ; Disetujui terbit: 31 - 12 - 2021

<https://doi.org/>

I. PENDAHULUAN

Kota Gorontalo merupakan ibukota Provinsi Gorontalo. Kendati baru menjadi ibukota provinsi bersamaan dengan berdirinya Provinsi Gorontalo pada tahun 2000 silam, Kota Gorontalo memiliki sejarah yang amat panjang. Sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari Provinsi Gorontalo. Diawali dengan eksistensi kerajaan-kerajaan yang semula saling bertikai, tetapi kemudian saling mengadakan persekutuan dalam bingkai *Limo lo Pohalaa*. Pernah juga tercatat sebagai vasal dari Kesultanan Ternate. Setelah itu wilayah ini jatuh di bawah kekuasaan VOC dan kemudian Belanda hingga meraih kemerdekaan pada 23 Januari 1942.

Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo pada umumnya mendapat julukan “Serambi Madinah” dan “Seribu Masjid”. Sebutan itu dirasa tidak berlebihan lantaran sejauh mata memandang sangat banyak ditemui masjid di Kota Gorontalo. Setiap kampung minimal memiliki satu masjid, bahkan bisa lebih. Julukan itu sekaligus menunjukkan bahwa Kota Gorontalo amat kental nuansa keislamannya. Pengaruh Islam yang begitu dalam juga tampak dalam ungkapan *adati hula-hula’a to sara’a, sara’a hula-hula’a to kuru’ani* (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Alquran).

Kota Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki luas terkecil di antara kabupaten-kabupaten di Provinsi Gorontalo (Kabupaten Pohuwatu, Boalemo, Gorontalo, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara). Presentasinya hanya 0,71 % terhadap luas Provinsi Gorontalo (BPS Provinsi Gorontalo, 2020: 9). Kendati demikian, Kota Gorontalo kaya akan keberagaman, baik secara agama maupun etnik. Kota Gorontalo dihuni oleh para penganut 6 agama yang diakui secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 tercatat penduduk yang menganut Islam sebanyak 184.524 jiwa, disusul dengan Protestan sebanyak 3.807 jiwa, Katolik 615 jiwa, Buddha 588 jiwa, dan terakhir Hindu 104 jiwa. Sementara agama Konghucu tidak tertulis dalam tabel sensus (BPS Provinsi Gorontalo, 2020: 231).

Sementara tempat peribadatan di Provinsi Gorontalo tampak dalam tabel berikut.

Wilayah se- Provinsi	2018						
	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota						
	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Klenteng
Boalemo	380	35	23	2	16	1	-
Gorontalo	890	19	26	1	1	-	-
Pohuwato	288	75	45	4	11	-	-
Bone Bolango	294	19	3	-	-	-	-
Gorontalo Utara	244	35	54	1	-	-	-
Kota Gorontalo	325	31	20	3	-	3	-
Provinsi Gorontalo	2421	214	171	11	28	4	-

Sumber: (BPS Provinsi Gorontalo, 2020: 232)

Masjid dan mushola menjadi tempat peribadatan terbanyak di Kota Gorontalo dengan jumlah 356 buah. Ini sangat sesuai dengan sebutan “Seribu Masjid” yang disematkan pada Kota Gorontalo. Setelah itu terdapat gereja Protestan sebanyak 20 buah, gereja Katolik 3 buah, wihara 3 buah, sementara untuk pura dan kelenteng tidak ada.

Tabel di atas tampak sedikit bermasalah. Menurut pengamatan penulis, di Kota Gorontalo terdapat kelenteng besar bernama Kelenteng Tulus Harapan Kita yang terletak di sisi timur Sungai Bolango. Eksistensi tempat peribadatan yang telah berusia ratusan tahun itu sekaligus menunjukkan keberadaan penganut Konghucu yang tidak tertulis dalam tabel sensus. Dengan demikian, total ada 6 agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu di Kota Gorontalo.

Selain dihuni oleh para penganut beragam agama, Kota Gorontalo juga didiami oleh penduduk yang multietnik. Mulai dari suku Gorontalo selaku suku asli yang mayoritas, kemudian ada etnik Bugis, Jawa dan Cina. Suku Gorontalo kebanyakan hidup terpencar, sementara suku Bugis mengelompok di Kampung Bugis, etnik Jawa kebanyakan di kampung transmigran, sementara etnik Cina di kampung Pecinan di Kelurahan Biawao yang mudah dikenali lantaran bentuk bangunan khasnya dan kelenteng besar di dalamnya.

Kehidupan masyarakat multikultural di Kota Gorontalo berlangsung harmonis dan jarang sekali terjadi konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan. Semuanya dapat hidup berdampingan satu sama lain. Ini merupakan fenomena yang menarik di sebuah kota yang dijuluki Seribu Masjid dan berpenduduk mayoritas muslim. Oleh sebab itu, perlu dicari faktor penyebab kerukunan masyarakat berlainan suku bangsa dan agama itu, sehingga bisa dijadikan masukan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam rangka pengambilan kebijakan.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, terasa menarik untuk mengkaji multikulturalisme di Kota Gorontalo. Beragam pertanyaan yang selanjutnya perlu di jawab adalah Pertama, bagaimana proses terbentuknya masyarakat multikultural di Kota Gorontalo? Kedua, bagaimana kehidupan sosial masyarakat multikultural di Kota Gorontalo? Ketiga, bagaimana strategi menjaga keutuhan masyarakat multikultural di Kota Gorontalo?

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam tulisan ini adalah Kota Gorontalo, ibukota Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo memiliki luas 79,59 Km² yang memiliki batas sebelah utara dan timur dengan Kabupaten Bone Bolango, batas selatan dengan Teluk Tomini, dan batas barat dengan Kabupaten Gorontalo (BPS Provinsi Gorontalo, 2020: 1). Sebelum menjadi ibukota provinsi, Kota Gorontalo merupakan sebuah kotamadya yang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara.

Sejarah Kota Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari Provinsi Gorontalo. Provinsi yang baru berdiri pada awal milenium ini mulanya merupakan sebuah kerajaan yang acap disebut

Kerajaan Gorontalo-Limboto. Dwi tunggal kekuatan politik itu membentuk persekutuan dengan 3 kerajaan lain, yaitu Boalemo, Bone, dan Atinggola. Kelimanya memperoleh sebutan *Limo lo Pohalaa* (lima bersaudara). Kerajaan Gorontalo dan Limboto menjadi pemimpin persekutuan tersebut (Juwono & Hutagalung, 2005: 8).

Kerajaan Gorontalo-Limboto pernah mengalami konflik berkepanjangan. Perang di antara kedua belah pihak sudah sering terjadi. Sejak pemerintahan raja Amai, konflik Gorontalo-Limboto memasuki babak baru. Perseteruannya kini melibatkan kekuatan-kekuatan besar di luar wilayah Gorontalo, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Gowa yang kian memperuncing jalannya konflik. Kendati demikian, intervensi Ternate dalam konflik juga membawa pengaruh positif, yaitu terjadinya proses Islamisasi di Gorontalo dan Limboto.

Menurut Hasanuddin dan Amin(2012: 21), penyebab perseteruan antara Gorontalo dan Limboto lantaran ulah penduduk kedua kerajaan. Wilayah perbatasan kedua kerajaan acap dilanggar oleh penduduk Gorontalo maupun Limboto untuk mengambil hasil hutan, hasil laut, dan emas. Akibatnya batas wilayah Gorontalo-Limboto menjadi kabur. Inilah yang menjadi sumber konflik Gorontalo yang berlangsung selama 2 abad.

Konflik yang terus menerus terjadi selama ratusan tahun ditambah intervensi Kerajaan Gowa dan Ternate membawa keprihatinan bagi para bangsawan Gorontalo dan Limboto. Mereka khawatir perang besar akan berkecamuk di Gorontalo akibat keterlibatan Gowa dan Ternate yang saling berebut wilayah dan pengaruh. Mereka kemudian menginisiasi perjanjian perdamaian dan persekutuan Gorontalo-Limboto guna mengakhiri konflik. Usaha mereka disambut baik oleh Raja Eyato dari Limboto dan Poheleo selaku raja Gorontalo. Para bangsawan Gorontalo bersama rajanya kemudian mengunjungi Limboto dan disambut baik oleh raja dan kalangan bangsawanan Limboto. Lantas diadakan perjanjian perdamaian dan persekutuan di antara kedua kerajaan tersebut disertai dengan ritual penenggelaman dua cincin di Danau Limboto sebagai simbol persatuan(Hasanuddin & Amin, 2012: 29-40).

Selama kekuasaan VOC Gorontalo dijadikan karesidenan berdampingan dengan Karesidenan Manado. Keduanya bertanggung jawab pada Gubernur Ternate. Lantas kurun waktu kekuasaan Inggris yang singkat (1811-1816) menghapus status Gorontalo sebagai sebuah karesidenan. Gorontalo tidak lagi dipimpin seorang residen tetapi dipimpin asisten residen yang harus mengonsultasikan dan mempertanggungjawabkan segala tindakannya pada residen di Manado. Kebijakan Inggris ini kemudian diteruskan oleh Pemerintah Kolonial Belanda (Juwono & Hutagalung, 2005: 237).

B. Proses Terbentuknya Masyarakat Multikultural di Kota Gorontalo

Reid mengatakan bahwa kawasan laut Asia Tenggara amat menguntungkan bagi kegiatan perdagangan. Kaum pedagang dimanjakan dengan keadaan airnya yang tenang, jarang terjadi badai, dan memiliki angin muson barat (Oktober-April) dan angin muson timur (April-Oktober) yang dapat diprediksi (Reid, 2014: 4). Kondisi serupa juga ditemukan

di Teluk Tomini yang termasuk perairan dalam Indonesia. Para pedagang kemudian banyak yang mendatangi Pelabuhan Gorontalo yang sekaligus strategis lokasinya untuk berdagang.

Kelompok pendatang yang datang ke Gorontalo di antaranya adalah etnik Bugis, Cina, dan Jawa. Suku Bugis telah lama terkenal sebagai kelompok pedagang pengarang samudra. Sejak abad 17 mereka telah mengadakan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Bahkan ketika rempah-rempah dimonopoli VOC, para pedagang Bugis tetap bisa mencari rempah-rempah di desa-desa sekitar Ambon dengan cara barter. Mereka seringkali berhasil menghindari patroli kapal-kapal Kompeni (Leirissa, 2000: 619).

Mengingat letak Gorontalo yang ramai, maka sudah barang tentu menjadi sasaran kaum pedagang Bugis yang haus ekonomi. Dari pelabuhan Gorontalo mereka dapat menyusuri Sungai Bone dan Sungai Boalemo untuk melakukan aktivitas perdagangan hingga pedalaman. Dikatakan bahwa katun dan gula dalam kaleng berukuran 15 dan 25 *bahar* dari Surabaya dimuat oleh kapal-kapal *paduwakang* Bugis untuk dijual di Kwandang (Pantai Utara). Kekayaan alam Gorontalo-Limboto berupa beras, rotan, damar, dan sebagainya kemudian dibeli oleh para pedagang Bugis lewat agen perdagangan Gorontalo untuk dijual kembali di wilayah Makassar (Juwono & Hutagalung, 2005: 22-23).

Sebagai pemain perdagangan samudra, tentu peran laut amat vital bagi etnik Bugis. Mereka kemudian memerlukan tempat tinggal yang dekat dengan laut atau minimal mudah menjangkau laut. Oleh karenanya, ketika raja Monoarfa lewat *apitalau* menawarkan permukiman di muara Sungai Bone tetapi dengan syarat mengusir perompak Mindanao dan Tobelo dari perairan Gorontalo, etnik Bugis di bawah pimpinan Lasimpala menyanggupinya. Setelah perompak berhasil dikalahkan, etnik Bugis memperoleh wilayah yang dijanjikan raja. Daerah itu kemudian dikembangkan menjadi perkampungan oleh orang-orang Bugis. Saat ini Kampung Bugis tersebut meliputi Kelurahan Bugis dan Kelurahan Talamate yang terletak di Kota Gorontalo (Hasanuddin & Amin, 2012: 128). Pertimbangan orang-orang Bugis menerima permukiman di muara Sungai Bone lantaran alirannya menuju Teluk Tomini yang ramai aktivitas perdagangannya.

Selain etnik Gorontalo dan Bugis, di Gorontalo juga banyak dihuni oleh suku Jawa. Mereka berasal dari Kampung Jawa Tondano, Sulawesi Utara dan merupakan keturunan Kyai Mojo. Pada 1904 orang-orang dengan sebutan Jawa-Tondano (Jaton) itu datang ke Gorontalo untuk mencari permukiman dan lahan pertanian baru. Ini karena mereka selama di Tondano hanya mengolah tanah sekitar kampung dan enggan mengolah tanah yang bukan menjadi milik mereka. Lambat laun ketika jumlah warga kampung semakin banyak, lahan pertanian menjadi semakin sedikit. Setibanya di Gorontalo, para pendatang Jawa itu kemudian mendirikan permukiman baru yang dinamakan Kampung Jawa Yosonegoro (Kembuan, 2016: 145).

Arus kedatangan lain suku Jawa dalam jumlah besar terjadi melalui program transmigrasi yang dimulai tahun 1953 hingga 1960. Pada tahun 1955, kaum transmigran Jawa yang dikirim ke Paguyaman telah mencapai 2204 orang. Kebanyakan datang dari Jawa Tengah dan Timur, sementara sisanya datang dari Jawa Barat. Mereka kemudian

mendirikan perkampungan sendiri yang dinamakan sesuai daerah asalnya, misalnya Desa Sidodadi dan Sidomulyo (Manay, 2016). Selain Paguyaman, kaum transmigran juga menuju Kota Gorontalo baik melalui transmigrasi resmi¹ maupun transmigrasi spontan² (Pristiwanto, 2016: 48).

Etnik lain yang semakin menjadikan Kota Gorontalo multikultural adalah etnik Cina. Keberadaan orang-orang Cina di Sulawesi Utara pertama kali terlihat dalam pembangunan *Fort Amsterdam* Manado yang selesai dibangun tahun 1678. Para pekerja Cina ditugaskan untuk membangunnya. Mereka didatangkan pegawai VOC dari berbagai wilayah di Nusantara. Mereka mendapat kepercayaan lantaran terkenal sebagai pekerja yang terampil dan berpengalaman (Gunawan, 2013: 28).

Para pekerja Cina yang memilih tinggal di Manado kemudian memutuskan untuk menekuni perdagangan. Selain berdagang di Manado, mereka juga berdagang hingga wilayah Gorontalo. Karena letaknya yang strategis, maka tidak mengherankan daerah Gorontalo kedatangan banyak pedagang Cina. Ini merupakan konsekuensi yang logis, karena kapanpun dan dimanapun, para pedagang pasti akan berdagang di tempat yang memiliki kemungkinan mendatangkan keuntungan yang banyak.

Kendati demikian, tidak semua orang-orang Cina awal di Kota Gorontalo berasal dari Manado. Ada yang datang langsung dari Makassar lewat Sulawesi Tengah, ada yang dari Jawa, bahkan ada yang datang langsung dari Tiongkok. Ini merupakan keterangan informan di Kota Gorontalo yang dapat dipercaya mengingat pada penghujung abad 19 pelabuhan Kota Gorontalo dan Kuandang sudah ditetapkan sebagai rute pelayaran KPM (Perusahaan Pelayaran Kerajaan)³ yang sekaligus menghubungkannya dengan Singapura dan pelabuhan lainnya di pesisir Asia Timur.

Kedatangan kaum pendatang Cina ke Gorontalo juga didorong oleh penemuan emas di pegunungan perbatasan Gorontalo-Kaidipang pada 1720-an. Orang-orang Gorontalo penemunya menjual emas kepada pedagang Cina dan kemudian dijual kembali ke Manado dengan harga yang lebih tinggi. Lambat laun makin banyak orang-orang Cina berlayar menuju Gorontalo mencari keuntungan dari tambang emas tersebut. Namun, pelayaran itu berhasil dicegah oleh Kompeni yang menginginkan untuk memonopolinya. Kendati demikian, perdagangan emas oleh orang-orang Cina masih tetap berlangsung secara gelap dengan bantuan pelaut Bugis dan Mandar (Juwono & Hutagalung, 2005: 124-127).

Setelah tiba di Kota Gorontalo, para pendatang Cina kemudian membangun permukiman khusus sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang yang lazim disebut kampung Pecinan. Permukiman Cina terletak di dekat Sungai Bolango (sekarang masuk Kelurahan Biawao, pusat Kota Gorontalo). Selanjutnya dilakukan pembangunan Kelenteng Tian Hou Kiong sebagai tempat ibadah agama Buddha, Tao, dan Konghucu sekaligus difungsikan

1 Transmigrasi yang secara resmi diadakan pemerintah dan ditanggung biayanya.

2 Transmigrasi atas kemauan individu dan dengan biaya sendiri.

3 *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) berdiri pada tanggal 4 September 1888, tetapi baru mulai beroperasi pada 1 Januari 1891. Selain bertujuan untuk menegaskan kekuasaan pemerintah kolonial atas Hindia Belanda, perusahaan ini juga berupaya untuk mengembangkan dan meluaskan perdagangan dengan dunia luar, terutama antara berbagai pelabuhan di Hindia Belanda dan negara Belanda. Lihat Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* (Jakarta: KPG, 2016), hlm. 101.

sebagai tempat berkumpul bagi orang-orang Cina. Pembangunannya digagas oleh Lie Bun Yat, Kho Lin Tjie, Yo Ho Lian, dan Lie Bun Tjae (Hasanuddin & Amin, 2012: 129).

Eksistensi etnik Cina di Kota Gorontalo kian diperkuat dengan keberadaan nisan berangka tahun 1863 di pemakaman Cina Kampung Siendeng dan sebuah prasasti bertariikh 1883 di Kelenteng Tian Hou Kiong. Keberadaan dua artefak ini menandakan bahwa orang-orang Cina adalah bangsa penetap, bukan sekadar bangsa penyinggah. Selain itu, eksistensinya juga menunjukkan adanya aktivitas keagamaan yang dilakukan orang-orang Cina (Gunawan, 2016: 44-45).

Para pendatang Bugis, Jawa, dan Cina hidup di tengah warga lokal Gorontalo yang mayoritas. Suku Gorontalo hidup menyebar, terdapat di berbagai wilayah hingga *onderdistrik* di Gorontalo dan tidak memiliki perkampungan khusus. Bahkan ada yang hidup di tengah hutan untuk menghindari diperbudak oleh kalangan bangsawan. Masyarakat berbagai suku bangsa itu dipimpin oleh minoritas bangsawan Kerajaan Gorontalo.

Keadaan itu tidak berubah ketika Pemerintah Kolonial memantapkan posisinya di Gorontalo pada abad 19. Mereka tetap berada di bawah golongan bangsawan dan kini juga berada di bawah golongan Eropa. Namun, keadaan berbeda dialami orang-orang Cina. Mereka didapuk sebagai pedagang perantara oleh Belanda lewat UU No. 6 *Algemeene Beppalingen van Wetgeving* tahun 1846 (Hasanuddin & Amin, 2012: 129). Oleh karenanya, posisinya berada di atas etnik Gorontalo, Bugis, dan Jawa, tetapi di bawah golongan Eropa.

Selain multietnik, Kota Gorontalo juga dihuni oleh penduduk dengan latar belakang agama yang beragam. Terdapat penganut 6 agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu) yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Islam memperoleh penganut terbanyak di Gorontalo sebanyak lebih dari 90% yang dapat dirasakan eksistensinya dengan banyaknya jumlah masjid. Sisanya terdapat penganut Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dua agama yang disebut terakhir kebanyakan dianut oleh etnik Cina. Selain itu, terdapat juga penganut kepercayaan di Gorontalo.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, masyarakat multikultural di Kota Gorontalo tidak muncul secara instan, tetapi memerlukan proses sejarah yang panjang. Kekayaan alam dan denyut perekonomian yang tinggi menjadi magnet bagi beragam suku bangsa untuk datang mengadu nasib di Gorontalo. Semula etnik Bugis, Jawa, dan Cina datang ke Gorontalo untuk berdagang. Mereka hanya singgah sementara di pelabuhan Gorontalo untuk mengambil komoditi dagang yang diperlukan kemudian kembali berlayar ke pulau lain untuk memasarkannya. Namun, lambat mereka kemudian menetap dan mendirikan permukiman di Kota Gorontalo. Kota Gorontalo kian ramai dan perekonomian semakin menggeliat.

⁴ Salah satu penganut kepercayaan di Gorontalo adalah suku Polahi. Mereka hidup di hutan pedalaman Desa Tamaila, Distrik Tolangohula yang harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 7 jam. Eksistensinya sudah ada sejak zaman kolonial. Mereka adalah orang-orang yang menolak tunduk pada kekuasaan Belanda dan kemudian memilih hidup di hutan yang terisolasi dari dunia luar. Kebiasaan unik suku ini adalah mempraktikkan perkawinan sedarah (*incest*). Lihat Tilome, A. A., & Al-Katiri, R. (2019). Polahi Tribe Inbreeding Culture in Gorontalo. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(6), 315-321.

C. Kehidupan Sosial Masyarakat Multikultural di Kota Gorontalo

1. Hidup dalam Keberagaman

Masyarakat multikultural di Kota Gorontalo terdiri dari etnik Gorontalo selaku masyarakat asli, dan etnik Bugis, Jawa, dan Cina yang merupakan kelompok pendatang. Catatan awal mengenai jumlah penduduk Gorontalo terlacak melalui laporan seorang misionaris Jesuit di Ternate. Lapornya pada 1591 memperkirakan jumlahnya sebanyak 10.000 orang (Henley, 2005: 198). Kekurangannya adalah tidak menyebutkan komposisi penduduk berdasarkan suku bangsa dan agama.

Baru pada tahun 1856 untuk pertama kalinya catatan kolonial melaporkan jumlah orang Cina di Gorontalo. Saat itu tercatat sebanyak 16 orang. Jumlahnya berkurang setengah menjadi 8 orang pada 1858, kemudian pada 1860 naik kembali menjadi 33 orang dan bertambah lagi menjadi 59 orang pada 1864, lantas menurun tahun 1865 dengan jumlah 54 orang (Henley, 2005: 201-202).

Etnik lain yang juga tercatat dalam laporan kolonial adalah etnik Bugis. Dilaporkan sepanjang abad 19 jumlah warga di Kampung Bugis cenderung fluktuatif. Orang Bugis berjumlah 691 jiwa pada tahun 1824, kemudian pada 1844 jumlahnya naik hampir dua kali lipat menjadi 1217 jiwa, tetapi pada tahun 1852 mengalami penurunan menjadi 750 orang. Pada tahun 1865 jumlahnya kembali naik menjadi 1823 orang (Henley, 2005: 51).

Selain itu, masyarakat Gorontalo mengenal adanya pelapisan sosial. Tingkat tertinggi ditempati raja dan permaisuri. Di bawah raja, terdapat keturunan dan kerabat raja sampai keturunan ketiga yang disebut *diti olongia*. Pada tingkat ketiga masih ditempati kelas bangsawan, tetapi di luar bangsawan peringkat dua yang disebut *walijali*. Posisi keempat dihuni rakyat biasa (*tuangalipu*) dan pada tingkat terbawah ditempati oleh budak (*wato*). Pasca Gorontalo mengalami Islamisasi muncul kelas sosial baru yaitu ulama yang sering disebut *bate* atau *batin* (Juwono & Hutagalung, 2005: 43-44).

Pada masa kekuasaan Belanda di Gorontalo berlaku stratifikasi sosial baru yang memilah penduduk menjadi 3 golongan: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Strata tertinggi ditempati golongan Eropa. Tingkatan bawahnya ada golongan Timur Asing yang masih dikelompokkan lagi menjadi Cina dan golongan Timur Asing lainnya (Arab dan India). Lapisan terbawah ditempati golongan Pribumi, yaitu semua penduduk asli di tanah jajahan (Wignjosoebroto, 2014: 167).

Seiring berjalannya waktu populasi penduduk Gorontalo kian bertambah. Menurut sensus penduduk kolonial pada 1930, jumlah penduduk Gorontalo adalah sebagai berikut.

Penduduk *Afdeeling* Gorontalo Berdasarkan Pencacahan Penduduk 1930

Suku Bangsa	Laki-Laki	Perempuan	Total
Inlanders	100.848	105.262	206.110
Europeanen	140	149	289
Chineezen	1.126	841	1.967
Andere vreemde Oosterlingen	737	709	1.446
	102.851	106.961	209.812

Sumber: *Volksteling 1930. 1936*(Gunawan, 2015: 3)

Berdasarkan tabel di atas penduduk terbanyak di *afdeeling* Gorontalo adalah penduduk pribumi sebanyak 206.110 orang. Mereka merupakan mayoritas yang dikuasai oleh minoritas orang-orang Eropa yang hanya berjumlah 289 orang. Pada urutan kedua terdapat etnik Cina berjumlah 1.967 jiwa yang berperan sebagai pedagang perantara antara Pribumi dan Eropa. Sementara golongan Timur Asing lainnya menduduki peringkat tiga dengan jumlah 1.446 orang.

Jumlah penduduk dengan rincian yang lebih lengkap pada tahun yang sama adalah sebagai berikut.

Sebaran Warga Setiap Distrik dan *Onderdistrik* di *Afdeeling* Gorontalo 1930

Distrik	Onderdistrik	Inlanders	Europeanen	Chineezen	Avo
Boalemo	Boalemo	8.416	6	39	30
	Paguat	11.818	-	100	20
	Paguyaman	4.434	5	9	-
Bone	Bone	5.774	1	16	1
	Bone Pante	10.096	-	10	4
Gorontalo	Kabila	17.842	4	40	39
	Kota Gorontalo	35.116	226	1.114	835
	Tapa	13.661	7	5	26
	Telaga	27.184	-	14	16
Kwandang	Atinggola	3.138	-	6	8
	Kwandang	7.014	5	69	90
	Soemalata	5.990	1	42	60
Limboto	Batudaa	17.463	33	45	14
	Tibawa	15.110	-	29	4

Sumber: *Volksteling 1930. 1936*(Gunawan, 2015: 4)

Tabel itu menunjukkan bahwa penduduk terpusat di Kota Gorontalo dengan jumlah 37.291 jiwa. Dari jumlah tersebut lebih dari 90% adalah Pribumi. Tabel ini sekaligus memperlihatkan berbagai suku bangsa sudah banyak yang hidup tersebar dan tidak lagi terkonsentrasi di Kota Gorontalo. Apabila dicermati kembali, jumlah orang asing terbanyak adalah etnik Cina dengan jumlah 1.538 orang. Mereka terkonsentrasi di Kota Gorontalo. Ini merupakan hal yang logis mengingat Kota Gorontalo merupakan pusat perdagangan.

Kendati demikian, orang-orang Cina pada waktu itu sudah hidup menyebar di setiap distrik hingga *onderdistrik*. Sementara minoritas bangsa Eropa paling banyak terdapat di Kota Gorontalo. Mereka terdiri dari asisten residen dan para bawahannya yang bertugas mengatur roda pemerintahan.

Kelompok etnik Gorontalo, Bugis, Jawa, dan Cina yang mendiami Kota Gorontalo menggeluti beragam profesi. Suku asli Gorontalo terdiri dari orang-orang bebas dan para budak. Warga bebas kebanyakan bekerja sebagai petani, sisanya bekerja sebagai pedagang, nelayan, dan pencari emas, sedangkan para budak hanya bekerja melayani para bangsawan. Mereka diperas tenaganya demi keuntungan pribadi para bangsawan (Juwono & Hutagalung, 2005).

Kehidupan masyarakat multikultural di Kota Gorontalo saling ketergantungan satu sama lain dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Para bangsawan Gorontalo misalnya, mempekerjakan rakyatnya untuk mencari emas di Tomini, Kaidipang dan tempat lain dan kemudian menjualnya pada pedagang Cina. Sementara pedagang Cina menjual candu dan mesiu lewat perdagangan gelap pada bangsawan Gorontalo. Lantaran manuver para pedagang Cina kerap dihalangi oleh Kompeni karena dianggap merugikan, mereka kemudian menggunakan jasa para perompak Bugis yang memiliki jaringan perdagangan yang luas di perairan Sulawesi pasca Perjanjian Bongaya untuk menyelundupkan produknya. Selain itu, para pedagang Cina dan Bugis juga memiliki peran sebagai pembeli komoditi andalan petani Gorontalo berupa beras, damar, dan rotan untuk kemudian dijual kembali pada pihak lain. Peran sebagai pedagang perantara kemudian kian didominasi oleh pedagang Cina setelah mendapat legitimasi secara hukum dari Belanda.

Orang-orang Bugis, selain berprofesi sebagai pedagang dan perompak, juga banyak yang bergabung dalam milisi bersenjata bentukan VOC. Dikatakan bahwa beberapa warga Kampung Bugis diangkat sebagai milisi bersenjata oleh Belanda untuk menjaga pos dagang dan pernah pula digunakan untuk meredam pemberontakan kecil pada 1827 (Henley, 2004: 98).

Sementara itu, relasi ekonomi antara berbagai suku bangsa yang berlangsung terus menerus menyebabkan kian kuatnya ikatan kepercayaan satu sama lain. Ikatan ini menjadi pintu masuk menuju hubungan sosial yang lebih dalam, seperti hubungan pertemanan, atau bahkan perkawinan. Fenomena pernikahan berlainan suku bangsa semacam itu, menurut Niode (2007: 78) sudah biasa terjadi di wilayah Gorontalo. Bahkan hukum adat Gorontalo mengatur bagaimana prosesinya.

Perkawinan dengan etnik asli Gorontalo memberi keuntungan bagi kelompok etnik pendatang Bugis, Jawa, dan Cina. Jejaring yang didasarkan atas faktor ekonomi dapat semakin diperluas. Bagi kelompok pedagang dapat mengembangkan jejaring perdagangan kewilayah lain, bahkan hingga wilayah pedalaman. Mereka mendapat kemudahan memperoleh hasil alam yang banyak dikerjakan petani Gorontalo untuk kemudian di jual kembali. Sementara bagi orang yang berkecimpung di dunia selain perdagangan, dapat memperluas jaringan pertemanannya yang akan memuluskan jalannya menuju kesuksesan.

Mengadakan perkawinan dengan penduduk lokal setelah menetap di suatu tempat sudah menjadi kebiasaan bagi etnik Bugis. Ini merupakan fenomena umum etnik Bugis di berbagai wilayah di Nusantara, seperti di Ambon (Leirissa, 2000), Kutai (Poelinggomang, 2016), dan Sumatra Barat Daya (Andaya, 2016). Keuntungan mengawini warga asli Gorontalo bagi orang-orang Bugis adalah memperluas jaringan ekonominya yang amat menunjang perannya sebagai kelompok pedagang.

Perkawinannya dengan etnik Gorontalo menyebabkan posisi ekonomi etnik Bugis kian kuat. Semakin banyak pengusaha-pengusaha Bugis baru yang bermunculan yang memberikan pengaruh besar bagi perekonomian Kota Gorontalo. Salah satunya adalah Jaenal Mappe, seorang pengusaha sukses pemilik salah satu mall di Gorontalo dan memiliki bisnis perhotelan, supermarket, dan toko emas yang tersebar di Jawa dan Sumatra. Ia sekaligus menjabat sebagai ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) (Wawancara dengan Hasanuddin, 5 Juni 2020). Pada perkembangan selanjutnya kian banyak orang-orang Bugis yang bekerja di sektor lain. Pada tahun 2001 sekelompok orang Bugis yang terdiri dari para dosen berhasil mendirikan Universitas Ichsan di Kota Gorontalo (Wawancara dengan Hasanuddin, 5 Juni 2020).

Perkawinan campuran (amalgamasi) juga dilakukan antara etnik Jawa baik laki-laki maupun perempuan dan etnik Gorontalo begitu pula sebaliknya. Pernikahan kedua etnik ini acap disebut pernikahan gado-gado atau Jagor (Jawa-Gorontalo). Karakteristiknya adalah anak-anak yang dilahirkan tidak menyangand nama *family*. Misalnya, pihak istri etnik Gorontalo sedangkan suaminya Jawa, maka anak yang dilahirkan tidak menggunakan *family* istrinya, tetapi menggunakan nama ayahnya yang Jawa di belakang nama anak (Pristiwanto, 2016: 36).

Langkah serupa dilakukan pula oleh etnik Cina. Perkawinan amalgamasi dengan warga setempat menyebabkan orang-orang Cina banyak kehilangan identitas Ketionghoannya. Misalnya, banyak yang tidak menggunakan lagi nama Tionghoa, tetapi sejak menikah menggunakan nama famili Gorontalo seperti Katili, Nusi, dan sebagainya, atau mengubah namanya menurut aturan Islam setelah menjadi mualaf. Pasca konversi agama dari Konghucu ke Islam, orang-orang Cina juga banyak yang meninggalkan tradisi leluhurnya di Tiongkok. Lantas penggunaan Bahasa Mandarin yang semakin jarang menyebabkan mereka tidak memahaminya lagi. Sebaliknya mereka justru lebih fasih berbahasa Gorontalo atau Indonesia lantaran asuhan ibunya yang asli Gorontalo. Dari segi penampilan fisik, orang-orang Cina Gorontalo semakin sulit dikenali lantaran memiliki warna kulit, bentuk wajah dan mata yang sangat berbeda dari ciri fisik khas etnik Cina. Perubahan ini menyebabkan munculnya sebutan Hitaci (hitam tapi Cina) yang disematkan pada mereka.

Dampak perkawinannya dengan orang-orang Gorontalo adalah usaha yang ditekuni orang-orang Cina menjadi aman dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk merambah bidang pekerjaan lain. Misalnya, Dokter Budi Doku yang pernah menjabat sebagai anggota DPD RI (2009-2014) dan kemudian menjadi wakil walikota Gorontalo periode 2014-2019. Ia menikahi perempuan anak keturunan pahlawan nasional Gorontalo,

Nani Wartabone. Selain itu, ia sering mengadakan kegiatan *tazkiran* (pengajian keagamaan) di rumahnya yang dihadiri berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda. pernikahannya dengan keturunan pahlawan dan kerelaannya menjadikan rumahnya sebagai tempat pengajian memperluas jaringan pertemanan dan politiknya, sehingga memuluskan jalannya menaiki tangga politik dari anggota dewan menjadi orang nomor dua di Kota Gorontalo (Gunawan, 2015: 9).



Gambar 2. Mantan Wakil Walikota Gorontalo (2014-2019), dr. Budi Doku (Gunawan, 2015: 9)

3. Potensi Konflik

Konsekuensi logis dari masyarakat multikultural adalah menyimpan potensi konflik yang besar. Apalagi di Kota Gorontalo, dimana masyarakatnya terdiri dari beragam suku bangsa dan agama, sangat rawan munculnya potensi konflik. Apabila tidak diatur dengan baik, dapat terjadi konflik berdarah, baik etnik maupun agama, seperti yang pernah terjadi di Kalimantan Barat, Poso, Ambon, Maluku Utara, dan Kalimantan Tengah pada akhir masa Orde Baru dan awal Reformasi (Klinken, 2007).

Hingga detik ini belum pernah terjadi konflik besar baik yang bernuansa agama maupun etnik di Kota Gorontalo. Kendati demikian, beberapa kali pernah terjadi persinggungan antar agama. Misalnya kasus Toko Mercy pada tahun 1991. Pemilik toko tidak sengaja menggunakan sisa kertas fotokopi yang bertuliskan ayat Alquran sebagai pembungkus foto. Tindakan itu memancing kemarahan kalangan mahasiswa yang kemudian menggelar aksi protes dan pengrusakan pada toko. Namun, aksi mahasiswa tidak sampai menjurus pada pembakaran, pengusiran, atau pembunuhan pada pemilik toko. Ini tidak dapat dilepaskan dari peran kelompok pedagang sekitar yang melindungi toko (Amin, 2012: 130).

Pada masa kolonial pernah terjadi konflik antara etnik Gorontalo dan Cina. Namun, penyebab sesungguhnya dari kejadian tersebut adalah Belanda. Pada penghujung 1870-an Belanda mengirim orang-orang Cina dalam jumlah besar ke Gorontalo. Tujuannya untuk mematahkan dominasi ekonomi kaum pedagang Bugis. Di antara orang-orang Cina yang datang, banyak yang kemudian bekerja di pertambangan emas di Sumalata di bawah *Goud*

Exploitatie Soemalata Mijnbouw. Orang-orang Gorontalo yang merasa terpinggirkan kemudian menyerang pejabat Belanda dan Pribumi serta mandor dan para pekerja Cina yang dianggap bertanggungjawab. Pergolakan itu baru bisa dipadamkan beberapa hari kemudian setelah didatangkan bantuan pasukan dari Manado (Juwono & Hutagalung, 2005: 342).

Selain itu, dalam kehidupan masyarakat multikultural di Kota Gorontalo pernah muncul masalah kecemburuan sosial antaretnik. Ini terjadi dalam dunia bisnis kuliner. Keberagaman suku bangsa di Kota Gorontalo semakin memperkaya menu makanan. Rumah makan yang dikelola berbagai etnik, terutama etnik Bugis, Jawa, dan Gorontalo tumbuh bak cendawan di musim hujan. Letaknya saling berdampingan satu sama lain. Disebutkan bahwa pada tahun 2019 jumlah rumah makan di Kota Gorontalo sebanyak 97 buah (BPS Provinsi Gorontalo, 2020: 380). Ini merupakan jumlah yang banyak untuk kota yang berukuran kecil.

Persaingan bisnis kemudian terjadi. Kompetisi secara sehat tentu tidak jadi masalah. Namun, pada kenyataannya yang terjadi adalah kompetisi yang tidak sehat, seperti melempar tuduhan yang tidak benar terhadap rumah makan lain yang menjadi rival. Ini dialami baik rumah makan Gorontalo, Jawa maupun suku bangsa lain. Seperti yang menimpa Rumah Makan Bakso Surabaya yang dituduh berbahan dasar tikus (Pristiwanto, 2016: 69).

Seringkali tuduhan yang dilemparkan juga dibumbui dengan hal-hal gaib. Tujuannya agar semakin merusak popularitas rival bisnis. Misalnya, menyebarkan fitnah bahwa rumah makan yang menjadi pesaingnya menggunakan pesugihan agar dagangannya laris. Tuduhan yang acap terdengar adalah rumah makan tertentu sebelum menghidangkan makanan terlebih dahulu kuahnya dikencingi tuyul atau dalam wadah makananya sudah diberi sebuah kain yang telah dirapal dengan mantra-mantra tertentu. Ada pula fitnah berupa jin yang mondar-mandir menghampiri setiap mangkuk pengunjung dan kemudian meludahinya agar terasa nikmat disantap. Seperti dialami Rumah Makan Ulan yang dituduh memelihara tuyul yang ditugasi mengencingi sambal dabu-dabu yang menjadi pendamping ikan agar rasanya terasa lezat dan membuat pengunjung ketagihan (Pristiwanto, 2016: 70). Kasus lainnya menimpa Rumah Makan Coto Makassar Mansyur di belakang kantor pos Gorontalo. Kuah cotonya diisukan dimasak bersama celana dalam perempuan (Pristiwanto, 2016: 70). Begitu fitnah-fitnah itu menyebar di tengah masyarakat, rumah makan yang bersangkutan langsung sepi seketika bahkan kemudian gulung tikar. Ini tentu saja sangat merugikan penjualnya.

D. Strategi Menjaga Keutuhan Masyarakat Multikultural di Kota Gorontalo

Masyarakat Kota Gorontalo yang terdiri dari beragam suku bangsa dan agama akan sering mengalami perbedaan pendapat. Bukan tidak mungkin akan berubah menjadi konflik sosial jika dibiarkan. Diperlukan strategi khusus untuk mencegahnya terjadi. Harapannya agar masyarakat multikultural di Kota Gorontalo dapat hidup rukun dan damai. Apabila harapan itu dapat dicapai, Kota Gorontalo dapat dijadikan kiblat percontohan bagi daerah lain dalam keberhasilannya merawat keberagaman.

1. Akulturasi Perekat Budaya

Perkawinan amalgamasi menjadi ajang pertemuan bagi dua kebudayaan yang berbeda. Diawali dengan interaksi sosial dan ekonomi antar etnik yang berlangsung dalam waktu lama yang kemudian mengantarkan memasuki jenjang pernikahan. Perkawinan menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat hubungan antar etnik. Perkawinan dapat menciptakan rasa saling menghormati kebudayaan masing-masing pasangan suami istri.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, perkawinan campuran berlainan etnik sudah biasa terjadi di Gorontalo. Sejak dahulu telah dipraktikkan baik oleh kalangan bangsawan maupun rakyat jelata. Misalnya perkawinan antara salah satu bangsawan Kerajaan Limboto bernama Humonggilu dan saudari Sultan Baabullah, raja Ternate, bernama Ju Mukmin (Juwono & Hutagalung, 2005: 15). Selain dapat memperluas jaringan ekonomi dan sosial, perkawinan juga dapat meredam konflik sosial antar etnik.

Perkawinan antar etnik sekaligus dapat melenyapkan sikap etnosentrisme. Salah satu pihak dalam pernikahan tidak lagi memandang rendah etnik pasangannya dan mengunggulkan etniknya sendiri, tetapi menganggap keduanya sederajat. Dengan lain perkataan, latar belakang etnik tidak lagi dipandang sebagai penentu dalam pernikahan, tetapi cinta yang menjadi landasannya.

2. Toleransi dalam Kerukunan

Toleransi menurut UNESCO dapat dipahami sebagai sikap hormat, penerimaan, dan apresiasi terhadap keberagaman (UNESCO, 1995). Masyarakat multikultural di Kota Gorontalo dalam kesehariannya telah mempraktikkan toleransi dengan baik. Sikap saling menghormati tampak dalam perilaku para pemeluk Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu di Kota Gorontalo. Ketika suatu penganut agama tengah melaksanakan ibadah, penganut agama lain tidak akan mengganggu prosesnya. Semuanya dapat menjalankan ibadah dengan baik. Praktik toleransi juga tampak ketika salah satu pemeluk agama mengadakan pesta besar. Misalnya, orang Katolik mengadakan acara pernikahan, maka hidangan makanannya dipastikan kehalalannya, sehingga dapat dinikmati oleh para tamu yang beragama Islam.

Potret lain toleransi dipraktikkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. Pemkot memfasilitasi ibadah para pemeluk agama dengan mendirikan tempat ibadah. Tidak jarang lokasi tempat ibadah saling berdekatan, pendirian tempat ibadah non-muslim di tengah “seribu” masjid juga tidak jadi masalah. Semuanya saling menghormati dan tidak mengusik kekhusyukan ibadah umat agama lain.

Sementara itu, guna mendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama di Gorontalo, maka dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Keanggotaannya diwakili oleh orang-orang dari berbagai latar belakang agama, mulai dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lembaga yang tersebar di kota dan seluruh kabupaten di Gorontalo ini mengutamakan proses dialogis untuk menyelesaikan isu-isu yang berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama. Ketika terjadi dugaan pengrusakan

musala yang terjadi di Desa Tamaluntung, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada Februari 2020 silam, FKUB menghimbau masyarakat Gorontalo agar tidak terpancing emosinya. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk selalu membina toleransi dengan pemeluk agama lain. Proses hukum atas dugaan pengrusakan tempat ibadah itu serahkan saja pada pihak yang berwajib (*FKUB Gorontalo Ajak Warga Terus Bina Sikap Toleransi - Kumparan.com*, n.d.).

3. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural di lembaga pendidikan amat diperlukan untuk menciptakan toleransi antar umat beragama. Banks dalam (Race, 2011: 5), menyebut pendidikan multikultural sebagai, "...konsep inklusif yang digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik, program, dan materi sekolah yang dirancang untuk membantu anak-anak dari berbagai kelompok untuk menikmati kesetaraan pendidikan...".

Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UM Go) menjadi salah satu lembaga pendidikan yang menerapkannya. Kendati universitas Islam, UM Go tidak hanya menerima mahasiswa muslim, tetapi juga mahasiswa dengan latar belakang agama yang beragam. Bagi mahasiswa muslim yang diterima, diwajibkan mengenakan jilbab, sedangkan mahasiswa non-muslim tidak diwajibkan memakainya (Sriwahyuningsih R Saleh & Chaterina Puteri Doni, 2018).

Pihak UM Go melakukan kegiatan yang mendorong terciptanya sikap saling toleransi antar pemeluk agama, terutama kegiatan Jumat for AIK⁵ (JUFAIKA). Semua mahasiswa baru, baik muslim maupun non-muslim, diwajibkan mengikutinya. Tujuan kegiatannya adalah menanamkan nilai-nilai Keislaman. Jadi pesertanya tidak harus Islam. Harapannya adalah agar para mahasiswa dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain tanpa memandang latar belakang agamanya dan dapat memiliki sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain (Sriwahyuningsih R Saleh & Chaterina Puteri Doni, 2018).

Potret lain pendidikan multikultural terlihat di SD Negeri 46 Hulontalangi Kota Gorontalo. Sekolah ini terletak di pusat kota yang beragam penduduknya dan dekat dengan beberapa tempat ibadah, seperti masjid, gereja, dan kelenteng. Selain itu, peserta didiknya tidak hanya terdiri dari anak yang beragama Islam, tetapi juga agama Kristen dan Buddha. Pada tahun 2017 tercatat jumlah murid yang beragama Islam sebanyak 331 orang, Kristen 67 orang, dan Buddha 42 orang. Sejumlah faktor itulah yang melatarbelakangi SD Negeri 46 Hulontalangi menerapkan pendidikan multikultural (Syafar, 2017).

Penerapan pendidikan multikultural di SD Negeri 46 Hulontalangi tampak dalam kurikulum sekolah, praktik pengajaran, pelaksanaan ibadah, dan perayaan hari besar. Ketika mengajar pelajaran umum (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya) semua murid tanpa pandang bulu dijadikan satu. Namun, dalam pengajaran ilmu agama, masing-masing murid akan dipisah berdasarkan latar belakang agamanya. Pemisahan tersebut bukan dalam rangka tidak mengakui keberagaman, tetapi lebih pada muatan keagamaan yang berbeda. Kendati demikian, dalam setiap pengajaran agama selalu ditekankan nilai-

5 Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

nilai toleransi terhadap pemeluk agama lain. Semua ini termaktub dalam kurikulum sekolah (Syafar, 2017).

Dalam pelaksanaan ibadah, pihak SD Negeri 46 Hulontalo memfasilitasi ruang ibadah bagi semua murid baik yang beragama Islam, Kristen, dan Buddha. Ketika murid yang muslim mengerjakan salat zuhur secara berjamaah di masjid, murid yang non-muslim akan diberi kesempatan beribadah atau mendapat bimbingan kerohanian di tempat khusus. Sementara dalam perayaan hari besar keagamaan, pihak SD Negeri 46 Hulontalo melibatkan semua murid untuk turut berpartisipasi, misalnya dalam kegiatan pawai Muharram bagi umat Islam, murid-murid yang non-muslim diperbolehkan untuk ikut serta. Mereka tidak mengenakan pakaian muslim seperti yang lainnya, tetapi mengenakan pakaian adat Gorontalo (Syafar, 2017).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kota Gorontalo, ibukota Provinsi Gorontalo, didiami penduduk yang berasal dari beragam etnik, diantaranya etnik Gorontalo, Bugis, Jawa, dan Cina. Selain itu, penduduknya memeluk enam agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Etnik Bugis, Jawa, dan Cina datang ke Kota Gorontalo untuk mengadu nasib dan kemudian mendirikan permukiman. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat lokal Gorontalo.

Keberagaman suku bangsa dan agama itu hampir tidak pernah menimbulkan konflik atau pertikaian yang mengancam masyarakatnya. Inilah yang membuat Kota Gorontalo unik dan memiliki kekhasan tersendiri ketimbang wilayah lain. Oleh karenanya, tidak berlebihan jika Kota Gorontalo dapat disebut sebagai miniatur kehidupan yang ideal berbangsa dan bernegara yang multikultural seperti Indonesia.

Ada beberapa faktor yang mampu meredam potensi konflik masyarakat multikultural di Kota Gorontalo, yaitu perkawinan campuran antar etnik yang menghilangkan sikap entosentrisme, pendidikan multikultural yang diajarkan beberapa lembaga pendidikan, rasa persatuan dari berbagai suku dan agama dalam bentuk toleransi, dan peran pemkot maupun tokoh agama yang dapat menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

Penelitian tentang multikulturalisme perlu mendapat perhatian yang lebih bagi ilmuwan sosial. Ini tidak lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural yang rawan terjadinya konflik. Bagi pemerintah daerah perlu untuk membuat peraturan daerah sebagai payung hukum untuk memelihara dan memperkuat kerukunan antar umat beragama dan antar etnis yang merupakan bagian penting dari proses pembangunan di Gorontalo. Bagi masyarakat Gorontalo perlu saling menumbuhkan kembangkan rasa toleransi, saling

menghormati, saling pengertian, dan saling percaya dengan etnis dan pemeluk agama lain. Selain itu, perlu juga untuk selalu mengedepankan musyawarah setiap timbul perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, B. (2012). *Memori Gorontalo: Teritori, Transisi dan Tradisi*. Ombak.
- Andaya, L. Y. (2016). "The Bugis-Makassar Diasporas". *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 68(1), 119–138.
- FKUB Gorontalo Ajak Warga Terus Bina Sikap Toleransi - *kumparan.com*. (n.d.). Retrieved June 6, 2020, from <https://kumparan.com/banthayoid/fkub-gorontalo-ajak-warga-terus-bina-sikap-toleransi-1skxJ0ixxMO/full>
- Gunawan, H. (2013). *Yok Tjæ & Chung Hwa, Menelusuri Jejak-Jejak Komunitas Tionghoa di Manado*. Kanisius.
- Gunawan, H. (2016). *Jaringan Perdagangan Masyarakat Tionghoa di Teluk Tomini Abad ke-20*. Amara Books.
- Gunawan, H. (2015). "Komunitas "Tionghoa-Gorontalo": Satu Negeri-Dua Generasi-Dua Wajah". *The 2nd International Conference on Chinese Indonesian Studies*, 1–12.
- Hasanuddin, & Amin, B. (2012). *Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*. Ombak.
- Henley, D. (2004). "Conflict, Justice, and the Stranger-King Indigenous Roots of Colonial Rule in Indonesia and Elsewhere". *Modern Asian Studies*, 38(1), 85–144.
- Henley, D. (2005). *Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930*. KITLV Press.
- Juwono, H., & Hutagalung, Y. (2005). *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*. Ombak.
- Kembuan, R. A. C. (2016). "Bahagia di Pengasingan" *Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Buangan di Kampung Jawa Tondano (1830-1908)*. UGM.
- Klinken, G. van. (2007). *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia & KITLV-Jakarta.
- Leirissa, R. Z. (2000). "The Bugis-Makassarese in the Port Towns; Ambon and Ternate Through the Nineteenth Century". *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 156(3), 619–633.
- Manay, H. (2016). "Proyek Demografi dalam Bayang-Bayang Disintegrasi Nasional: Studi Tentang Transmigrasi di Gorontalo, 1950-1960". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 1(2), 93.
- Niode, A. S. (2007). *Gorontalo, Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*. Pustaka Indonesia Press.
- Poelinggomang, E. L. (2016). *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. KPG.

- Pristiwanto. (2016). *Binte Biluhuta-Gado Gado Ulek: Dari Kuliner Hingga Tradisi dalam Kebudayaan Jawa di Kota Gorontalo*. Amara Books.
- Race, R. (2011). *Multiculturalism and Education*. Continuum.
- Reid, A. (2014). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I Tanah di Bawah Angin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sriwahyuningsih R Saleh, & Chaterina Puteri Doni. (2018). “Penanaman Dan Implementasi Nilai Pendidikan Multikultural (Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Gorontalo)”. *Education Journal : Journal Educational Research and Development*, 2(1), 41–58.
- Tilome, A. A., & Al-Katiri, R. (2019). “Polahi Tribe Inbreeding Culture in Gorontalo”. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(6), 315–321.
- BPS Provinsi Gorontalo. (2020). *Provinsi Gorontalo dalam Angka 2020*. BPS Provinsi Gorontalo.
- Syafar, D. (2017). “Pluralisme Agama dalam Pendidikan (Potret Toleransi Beda Agama di SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo)”. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 99–115.
- UNESCO. (1995). *Declaration of Principles on Tolerance*. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- Wignjosobroto, S. (2014). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. HuMa; VVI-Leiden; KITLV-Jakarta; Epistema Institute.

Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Alamat
1	Hasanuddin	L	52	Peneliti BPNB Manado	Perum Griya Paniki Indah, Jl. Gandaria, Manado